

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, terdapat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Putusan 91 menyatakan inkonstitusional bersyarat kepada UU 11-2020 dan tidak memperbolehkan membuat peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11-2020. UU 11-2020 merupakan peraturan yang berlaku mengenai kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan mengenai penetapan upah minimum dalam UU 11-2020 mendelegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Untuk Tahun 2023 seharusnya tidak dipergunakan karena bertentangan kepada Putusan 91 dan UU 11-2020 serta peraturan pelaksanaannya yang tidak mendelegasikan pelaksanaan upah minimum melalui Peraturan Menteri.
2. Dampak terhadap penetapan formula minimum untuk tahun 2023 dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Untuk Tahun 2023 adalah terjadi perbedaan pengaturan terkait formula upah minimum yang menyebabkan hasil penghitungan upah minimum yang tidak seimbang. Hasil upah yang dimiliki oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan lebih rendah daripada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Untuk Tahun 2023. Ketentuan tersebut menjadi bertolak belakang dengan asas perundang-undangan. Walaupun isi pengaturan

lebih menguntungkan bagi pekerja. Namun, dalam perkembangan terbaru formula perhitungan upah minimum yang menghasilkan nilai yang lebih tinggi Permen 18-2022 telah diadopsi oleh PP 51/2023. Dengan demikian, formula perhitungan pembaharuan upah minimum bagi pekerja sudah menguntungkan.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 karena formula perhitungan sudah diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan .
2. Pengusaha dan pekerja/buruh harus patuh menggunakan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai acuan formula perhitungan upah minimum, apabila salah satu pihak keberatan dengan bisa mengajukan pengujian.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Surat dan Keputusan

Surat Menteri Ketenagakerjaan B-M.360.HI.01.00.XI.2022 tentang Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.717-Kesra/2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Buku

Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Hanifah, Ida., *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Medan: Pustaka Prima, 2020).

Irsan, Koesparmono., Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2016).

Kartasapoetra, G., *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998).

Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

Putra, Zulfikar., Darmawan Wiridin, Farid Wajdi, *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja* (Malang: Ahlimedia Press . Februari 2022).

Qamar, Nurul. et.al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius: 2017).

Soeprapto, Maria Farida Indrati., *Ilmu Perundang Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007).

Voss, Guus Heerma Van., Suya Tjandra, *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia* (Denpasar: Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

Jurnal

Apendi, Sofyan., *Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional*, PALAR (Pakuan Law Review) (Vol. 07, No. 01, Januari-Juni 2021).

Ar-Razaq, Zufar Maulana., Rahayu Subekti, *Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan Dengan Kenyataan*, Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Vol. 1, No. 1, 2022).

Adhistianto, Mohamad Fandrian., Siti Rohmah, *Paradoks Implementasi Kebijakan Upah Minimum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-*

XVIII/2020, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau (Vol. 12, No. 1, Februari 2023).

Aprilsesa, Tri Dian., Muhammad Tahir, Siti Aminah, Marnita, *Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Upah pada Buruh Dibawah Upah Minimum*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial (Vol. 5, No. 1, 2023).

Bimantya, Deva Mahendra Caesar., Muh. Ali Masnun, *Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Novum: Jurnal Hukum (Juli 2023).

Febriansyah, Ferry Irawan., *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Perspektif (Vol. XXI, No. 3, September 2016).

Iswaningsih, May Linda., I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam UU No. 11 Tahun 2020 Perihal Omnibus Law Cipta Kerja*, Jurnal Preferensi Hukum (Vol. 2, No. 3, 2021).

Irawan, Atang., *Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, Jurnal Litigasi (Vol. 23 (1), April 2022).

Jemarut, Wihelmus. I Gusti Agung Andriani, Pahrur Rizal, *Penetapan Upah Minimum Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawl*, Jurnal Interpretasi Hukum (Vol. 4, No. 1, 2023).

Kartikasari, Hesty., Agus Machfud Fauzi, *Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan; Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Doktrina: Journal of Law (Vol. 4, No. 1, April 2021).

Kusbansini, Ely., Fajar Ari Sudewo, Titi Kusrina, Suci Hartati, Imawan Sugiharto, Mukhamad Khamim, *Implikasi Pembangunan Investasi di Daerah terkait UU serta Peraturan Pemerintah Pengganti UU Cipta Kerja*, Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, (Vol. 2, No. 2, 2023).

Mezuki, Meray Hendrik., *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Penelitian Hukum*, Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (Vol. 5, No.3, Maret 2006).

Octavia, Nurul Aini., *Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat Yang Sianut Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-undangan: Kesalahan ateoritik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020*, Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam (Vol. 16, No. 2, Desember 2022).

Putra, Antoni., *Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi (Vol. 20, No. 1, 2023).

Risha, Idul., *Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law*, Undang: Jurnal Hukum (Vol. 5, No. 1, 2022).

Ubaiyana, Mar'atun Fitriah., *Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU 12/2011*, Mimbar Hukum (Vol. 33, No. 2, Tahun 2021).

Wiryawan, I Wayan Gde., *Dilematika Kebijakan Upah Minimum Dalam Pengupahan Di Indonesia*, Jurnal Advokasi (Vol. 6, No. 1, 2016).

Wiswamitra, Ida Bagus Gede., I Nyoman Putu Budiarta, I Wayan Kartika Jaya Utama, *Kajian Yuridis Terkait Penentuan Besar Upah Pekerja Berdasarkan Pasal 88 C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Analogi Hukum (Vol. 4, No. 3, 2022).

Wijaya, Gabrielle Priscilla., *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil Terhadap Undang-Undang Nomor:11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Mandalika Law Journal (Vol. 1, No. 1, Mei 2023).

Yuliani, Andi., *Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia (Vol. 14, No. 04, Desember 2017).

Internet

Budianto, Valerie Augustine., *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>

Badan Pusat Statistik, *Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi (rupiah)*, 2022.

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/WVJ1ekI3NzNYeFNqVDdaUjRoWHVjQT09/da_13/1

Badan Pusat Statistika, *Inflasi Bulanan Tujuh Kota (y on y) (Persen)*, 2022.

<https://jabar.bps.go.id/indicator/3/46/1/inflasi-bulanan-tujuh-kota-y-on-y-.html>

Badan Pusat Statistik, *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,18 juta rupiah per bulan.*

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Putusan MK yang Tidak Dihormati.* <https://pshk.or.id/blog-id/putusan-mk-yang-tidak-dihormati/#:~:text=PADA%2025%20November%202021%2C%20Mahkamah,luas%20terkait%20UU%20Cipta%20Kerja>

Bahan lainnya

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Powerpoint.